

OPTIMALISASI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI KELURAHAN LINGGASARI KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

Nuraini¹, Agus Nurulsyam², Abdul Mutholib³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

Email : nuraini007@gmail.com

ABSTRAK

Hasil observasi penulis menunjukkan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum optimal. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana?, 2) Bagaimana hambatan-hambatan optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana? 3) Bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 10 (sepuluh) orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : 1) Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari belum dilakukan secara optimal seperti : kesulitan untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang di butuh kan untuk pelaksanaan pembangunan, belum adanya jaminan dari Pemerintah kelurahan untuk dapat meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat terintegrasi dan berkelanjutan. 2) Adanya hambatan-hambatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang antara lain masyarakat kurang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan walaupun telah diundang, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pembangunan. 3) Adanya upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang antara lain meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan dengan meningkatkan kerja sama dengan ketua Rukun Tetangga (RT) setempat untuk menghadiri setiap kegiatan musyawarah, memperhitungkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Kata Kunci : *Optimalisasi, Pembangunan, Sarana dan Prasarana, Kelurahan*

PENDAHULUAN

Pembangunan di tingkat kelurahan merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Berhasilnya pembangunan nasional termasuk pembangunan di kelurahan, ditentukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

Dengan sarana dan prasarana kelurahan yang terbatas seperti kurangnya akses jalan yang tidak memadai, penerangan jalan yang tidak maksimal, irigasi yang kurang baik sehingga masyarakat tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Dengan fenomena di atas dapat menghambat masyarakat untuk beraktivitas ke sentra-sentra ekonomi dan industri sekitarnya serta memasarkan produk yang dihasilkan.

Salah satu tugas kelurahan yaitu melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana. Kelurahan dikatakan berhasil apabila pembangunan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana merupakan salah satu program pembangunan di kelurahan yang masih perlu dibenahi dimana masih banyak sekali pembangunan yang belum merata. Keadaan seperti ini membuat masyarakat menjadi kesulitan dalam melakukan aktivitas. Masyarakat tentunya menginginkan suatu perubahan demi menunjang kemudahan dalam beraktivitas dan demi kelancaran ekonomi. Pembangunan sarana dan

prasarana sudah sepatutnya dilaksanakan dan dinikmati masyarakat sebab pemerintah pusat telah memberikan anggaran ke setiap kelurahan untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, maka sangat perlu diketahui apa yang menjadi kendala ataupun permasalahan yang dihadapi sehingga pembangunan sarana dan prasarana tersebut belum berjalan efektif. Peranan kelurahan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana. Kelurahan sebagai penyelenggara pembangunan memiliki peran yang sangat penting baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Dalam hal pembangunan dibutuhkan keterlibatan aktif serta keseriusan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah kelurahan harus melaksanakan perannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dinyatakan bahwa Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan sarana dan

prasarana secara lebih efektif, maka pemerintah kelurahan dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan sarana dan prasarana pada dasarnya adalah pembangunan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah.

Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum optimal, hal ini terlihat dari adanya beberapa indikator sebagai berikut :

1. Hasil pembangunan sarana dan prasarana kurang sesuai dengan keinginan masyarakat hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara rencana dengan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan. Contohnya masyarakat RW 04 menghendaki adanya perbaikan drainase namun ternyata yang dibangun adalah pembangunan balai RW.
2. Hasil pembangunan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan

petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan sehingga hasilnya terdapat perbedaan dengan apa yang ditargetkan. Contohnya adanya anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang dianggarkan.

3. Kurangnya masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien. Contohnya partisipasi masyarakat masih kurang dalam membantu kekurangan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sehingga menyebabkan kualitas pembangunan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti bermaksud berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Optimalisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis”**

KAJIAN PUSTAKA

Peran pemerintahan kelurahan dalam optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sangat penting untuk dapat merealisasikan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang mengharapkan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih memadai

sehingga diperlukan suatu optimalisasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana.

Pembangunan sarana dan prasarana (sarana dan prasarana) merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi-segi non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sujarto (2015:12), yang menyebutkan bahwa : Pembangunan sarana dan prasarana merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial serta budaya masyarakatnya.

Kuncoro (2010:20) menyatakan bahwa :

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Pembangunan fisik misalnya berupa Sarana dan prasarana, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan sarana dan prasarana secara lebih efektif, maka kelurahan memiliki kewenangan, hal ini sejalan dengan pendapat Soemantri (2011:73) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perlu

memperhatikan aspek-aspek yang antara lain:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang dan antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar desa dengan pemerintahan yang lebih atas
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Lamanya penelitian selama 8 (delapan) bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) orang. Teknik analisa data dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, belum dilakukan secara optimal seperti : kesulitan untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, belum adanya jaminan dari Pemerintah kelurahan untuk dapat meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat terintegrasi dan berkelanjutan dengan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya, kurang memberikan jaminan bahwa pembangunan Sarana dan prasarana yang dilaksanakan dapat saling berkaitan dengan pembangunan yang telah dilaksanakan karena pada kenyataannya masih ada program pembangunan yang memang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama dalam musyawarah desa, kurang melakukan sosialisasi dan belum secara terbuka dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Sarana dan prasarana yang akan dilaksanakan, kurang dilakukan pengawasan sehingga belum mampu memberikan jaminan mengenai penggunaan sumber daya secara efisien dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana

Apabila diuraikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan

sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut.

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa koordinasi antar pelaksana pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis masih kurang hal ini dikarenakan peran aktif masyarakat dalam pembentukan panitia pelaksana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana masih kurang sehingga menyebabkan koordinasi dengan panitia pelaksana pembangunan sarana dan prasarana kurang terjalin dengan baik selain itu masih rendahnya dukungan terhadap panitia pelaksana pembangunan sarana dan prasarana.

Menurut pendapat Kunarjo (2012:7) menyatakan bahwa :

Koordinasi dalam pembangunan merupakan suatu usaha menyinkronkan kegiatan sehingga terdapat kerja sama yang terarah menuju sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan sebelum pelaksanaan program sangat penting dilakukan guna menunjang keberhasilan program karena tanpa perencanaan terlebih dahulu, suatu program akan susah dijalankan. Selain perencanaan, koordinasi juga dilakukan dalam anggaran dan pelaporan.

Dengan demikian adanya ketidaksesuaian hasil penelitian dengan

teori tersebut karena permasalahan yang terjadi di lapangan antara lain kurangnya peran aktif masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan sehingga masyarakat masih jarang mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan sehingga kurang mengetahui rencana kegiatan pembangunan yang ditetapkan, selain itu kerja sama antar pelaku masih kurang sehingga kurang memiliki komitmen yang jelas dalam melaksanakan proses pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, ruang dan waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar kelurahan dengan pemerintahan yang lebih atas

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah kelurahan belum dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, ruang dan waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar kelurahan dengan pemerintahan yang lebih atas di Kelurahan Lingasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis hal ini dikarenakan pemerintah kelurahan belum dapat menjamin adanya jaminan terciptanya integrasi dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dan kurangnya jaminan bahwa pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan kurang sesuai dengan perencanaan pembangunan mengingat masih adanya beberapa hasil pembangunan yang tidak sesuai dengan target waktu

penyelesaian karena kurangnya anggaran. Selain itu masih kurangnya jaminan bahwa pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan dapat bersinergi dengan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan karena dalam kenyataannya hasil pembangunan kurang memperhatikan kesinambungan dengan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Menurut Kurniawan (2015: 14) menyatakan bahwa :

Perencanaan pembangunan daerah diperlukan agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan efisien, efektif, tepat pada sasaran, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Pembangunan daerah juga harus dapat berjalan dengan sinergi, terintegrasi, dan terpadu, baik antar wilayah, antar sektor, maupun antar tingkat pemerintahan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian pihak kelurahan dalam menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, ruang dan waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar kelurahan dengan pemerintahan yang lebih atas hal ini dikarenakan kurangnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga keterbatasan anggaran belum dapat diatasi oleh swadaya masyarakat selain itu usulan kegiatan dari masyarakat kurang memperhatikan kelanjutan dari

program pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan kurang memberikan jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kelurahan Lingasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis hal ini dikarenakan pemerintah kelurahan kurang mendapatkan dukungan mitra kerja pemerintah desa dan masyarakat dalam menjamin keterkaitan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sehingga mengakibatkan adanya pembangunan yang kurang sesuai dengan yang telah direncanakan. Selain itu permasalahan anggaran menjadi masalah dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan serta kurangnya dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh mitra kerja kelurahan.

Menurut Wahyudin (2015:19) menyatakan bahwa :

Pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa bertujuan untuk terciptanya sebuah tujuan yang telah ditetapkan sehingga semua pihak memiliki

kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan kurangnya dilakukan pengawasan oleh lembaga mitra kerja pemerintah desa dengan masyarakat sehingga menyebabkan pelaksanaan pembangunan kurang dilaksanakan sesuai dengan rencana selain itu anggaran yang digunakan belum sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pembangunan karena anggaran yang diberikan kepada pelaksana masih kurang.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan kurang mengoptimalkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Lingasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis hal ini dikarenakan masyarakat kurang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana yang akan dilaksanakan sehingga hasil pembangunan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam berbagai kesempatan masyarakat kurang berperan aktif dalam kegiatan tersebut walaupun sebetulnya telah diundang.

Menurut Zamroni (2012:51) menyatakan bahwa :

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan hal ini dikarenakan keterlibatan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan serta evaluasi pembangunan masih kurang sehingga target pembangunan tidak tercapai padahal masyarakat sebagai pengguna serta subjek pembangunan sudah seharusnya berperan aktif sehingga kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan kurang menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya yang ada sehingga belum dapat menunjang pencapaian tujuan pembangunan di kelurahan secara

efektif, efisien dan berkeadilan mengingat kurangnya keterampilan masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga dalam melaksanakan suatu kegiatan pembangunan masih menggunakan tenaga kerja dari luar kelurahan.

Menurut Lasito (2011:28) menyatakan bahwa :

Pembangunan itu sendiri haruslah merupakan suatu proses belajar, yaitu maksudnya peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuannya sendiri.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemerintah kelurahan kurang menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan hal ini dikarenakan dalam melaksanakan pembangunan kurang ditunjang dengan ketersediaan sumber daya yang memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan sehingga masih menggunakan sumber daya dari luar karena tidak tersedianya sumber daya sesuai dengan yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum terlaksana secara optimal karena kesulitan untuk mendapatkan sarana

dan prasarana yang di butuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, belum adanya jaminan dari Pemerintah kelurahan untuk dapat meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat terintegrasi dan berkelanjutan dengan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya, kurang memberikan jaminan bahwa pembangunan Sarana dan prasarana yang dilaksanakan dapat saling berkaitan dengan pembangunan yang telah dilaksanakan karena pada kenyataannya masih ada program pembangunan yang memang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama dalam musyawarah desa, kurang melakukan sosialisasi dan belum secara terbuka dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Sarana dan prasarana yang akan dilaksanakan, kurang dilakukan pengawasan sehingga belum mampu memberikan jaminan mengenai penggunaan sumber daya secara efisien dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana .

Berdasarkan hasil observasi bahwa pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum dilakukan secara optimal seperti : kurang melakukan koordinasi dengan panitia pelaksana pembangunan sarana dan prasarana , kondisi anggaran dan sarana dan prasarana yang minim, pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, masih kurangnya informasi dan belum adanya undangan secara

resmi terhadap semua elemen masyarakat dalam rapat perencanaan pembangunan, tidak dapat menjamin penggunaan sumber daya secara efisien dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan karena hanya berdasarkan laporan dari pelaksana saja.

2. Hambatan-hambatan optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang antara lain masyarakat kurang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan walaupun telah diundang sehingga target pembangunan tidak tercapai. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pembangunan sehingga target pembangunan tidak tercapai, kurangnya kerja sama antar lembaga atau mitra kerja pemerintahan kelurahan sehingga menyebabkan pelaksanaan pembangunan kurang berjalan lancar.

Apabila diuraikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya koordinasi antar pelaku pembangunan hal ini disebabkan kurangnya peran serta masyarakat

dan mitra kerja pemerintah desa dalam membantu panitia pelaksana kegiatan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sehingga dukungan terhadap TPK masih kurang optimal.

2. Belum dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah dalam pelaksanaan pembangunan hal ini diakibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan tidak ada rambu-rambu yang ditetapkan sehingga tidak ada pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan serta bersinergi dengan wilayah lain karena usulan yang diterima dan ditetapkan kurang memperhatikan hal tersebut.
3. Belum dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hal ini dikarenakan kurangnya dilakukan pengawasan oleh masyarakat maupun mitra kerja pemerintah desa terhadap setiap proses dalam pembangunan yang dilaksanakan sehingga PPK kurang mendapatkan masukan untuk perbaikan ke depannya.
4. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan sehingga menyebabkan hasil pembangunan kurang terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan masyarakat walaupun diundang dalam musyawarah perencanaan,

pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan tidak datang.

5. Pemerintah kelurahan belum dapat menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya yang ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal seperti ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan masih kurang sehingga terpaksa menggunakan tenaga kerja dari luar.

Sementara itu menurut Adisasmita (2006:3) menyatakan bahwa :

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan

Ciamis Kabupaten Ciamis sehingga dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan karena kurangnya kerja sama antar mitra kerja pemerintah desa dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan dan kurangnya pelibatan semua pihak dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan sehingga hasil pembangunan kurang bersinergi dan berkesinambungan.

3. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan kinerja optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang antara lain meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan dengan meningkatkan kerja sama dengan ketua RT setempat untuk menghadiri setiap kegiatan musyawarah, memperhitungkan RAB dalam setiap rencana pembangunan agar pelaksanaan pembangunan mencapai target yang ditetapkan, meningkatkan kerja sama antar lembaga atau mitra kerja pemerintahan kelurahan sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan

lancar karena semua pihak memberikan dukungan.

Apabila diuraikan hasil penelitian mengenai upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan dengan melibatkan semua mitra kerja pemerintah desa dalam membantu panitia pelaksana kegiatan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sehingga TPK mendapatkan dukungan secara optimal.
2. Berupaya menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah dalam pelaksanaan pembangunan hal ini dilakukan dengan adanya pedoman dalam melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan sehingga tidak ada rambu-rambu yang ditetapkan sehingga pembangunan terintegrasi dan berkelanjutan serta bersinergi dengan wilayah lain.
3. Berupaya menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hal ini dilakukan dengan mengefektifkan pengawasan oleh masyarakat maupun mitra kerja pemerintah desa terhadap setiap proses dalam pembangunan yang dilaksanakan sehingga

- permasalahan-permasalahan dapat diselesaikan secara bersama-sama.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan sehingga hasil pembangunan terlaksana dengan baik hal ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat menjadi TPK di wilayahnya sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana .
 5. Pemerintah kelurahan berupaya menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan hal ini dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan sehingga nantinya memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan tidak lagi membutuhkan tenaga kerja dari luar apabila di tingkat lokal masyarakat sudah memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya Solekhan (2014:79) menyatakan bahwa sasaran pokok pembangunan kelurahan adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat di kelurahan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri. Sasaran pembangunan kelurahan tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah:

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja di kelurahan.

2. Peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah kelurahan.
3. Penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat kelurahan.
4. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat kelurahan
5. Pengembangan sarana dan prasarana kelurahan
6. Pemantapan keterpaduan pembangunan kelurahan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian maka dalam pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan maka harus diupayakan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja di kelurahan sehingga tidak perlu mengambil dari luar apabila ada program pembangunan, meningkatnya kemampuan aparaturnya pemerintah kelurahan karena seringkali melaksanakan pembangunan sehingga dapat memahami mekanisme dalam pelaksanaan pembangunan, melalui pembangunan dapat meningkatkan kemampuan mitra kerja pemerintahan sehingga dapat lebih solid dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena adanya kemudahan masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan karena sarana dan prasarana lebih memadai sehingga pembangunan lebih terpadu dan bersinergi dengan hasil pembangunan yang lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, belum dilakukan secara optimal seperti : kesulitan untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, belum adanya jaminan dari Pemerintah kelurahan untuk dapat meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat terintegrasi dan berkelanjutan dengan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya, kurang memberikan jaminan bahwa pembangunan Infrastruktur yang dilaksanakan dapat saling berkaitan dengan pembangunan yang telah dilaksanakan karena pada kenyataannya masih ada program pembangunan yang memang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama dalam musyawarah desa, kurang melakukan sosialisasi dan belum secara terbuka dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Infrastruktur yang akan dilaksanakan, kurang dilakukan pengawasan sehingga belum mampu memberikan jaminan mengenai penggunaan sumber daya secara

efisien dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Begitu pula dengan hasil observasi bahwa pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum dilakukan secara optimal seperti : kurang melakukan koordinasi dengan panitia pelaksana pembangunan infrastruktur, kondisi anggaran dan sarana dan prasarana yang minim, pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan, masih kurangnya informasi dan belum adanya undangan secara resmi terhadap semua elemen masyarakat dalam rapat perencanaan pembangunan, tidak dapat menjamin penggunaan sumber daya secara efisien dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan karena hanya berdasarkan laporan dari pelaksana saja.

2. Adanya hambatan-hambatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang antara lain masyarakat kurang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan walaupun telah diundang sehingga target pembangunan tidak tercapai. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pembangunan sehingga target pembangunan tidak tercapai, Kurangnya kerja sama antar

lembaga atau mitra kerja pemerintahan kelurahan sehingga menyebabkan pelaksanaan pembangunan kurang berjalan lancar. Begitu pula dengan hasil observasi bahwa adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis hal ini dikarenakan kurangnya dukungan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan, kurangnya sinkronisasi dan integrasi dalam pelaksanaan pembangunan dengan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan selanjutnya serta masyarakat dalam mengusulkan kegiatan pembangunan kurang mempertimbangkan kemanfaatan hasil pembangunan sehingga kurang terintegrasi dengan pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Adanya upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang antara lain meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan dengan meningkatkan kerja sama dengan ketua RT setempat untuk menghadiri setiap kegiatan musyawarah, memperhitungkan RAB dalam setiap rencana pembangunan agar pelaksanaan pembangunan mencapai target yang

ditetapkan, meningkatkan kerja sama antar lembaga atau mitra kerja pemerintahan kelurahan sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan lancar karena semua pihak memberikan dukungan. Begitu pula dengan hasil observasi bahwa adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis hal ini dilakukan dengan meningkatkan dukungan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan, Memberikan pedoman bagi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan agar terjadi sinkronisasi dan integrasi dalam pelaksanaan pembangunan dengan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan selanjutnya serta memberikan arahan kepada masyarakat untuk mempertimbangkan kemanfaatan hasil pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut.

1. Sebaiknya pihak kelurahan meningkatkan peran aktif mitra kerja pemerintah desa seperti lembaga pemberdayaan masyarakat dan karang taruna serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan sehingga dapat merealisasikan rencana

- pembangunan yang telah ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan selain itu dengan pelibatan masyarakat maka permasalahan keterbatasan anggaran dapat diatasi karena masyarakat akan mengetahui berbagai permasalahan dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat membantu secara swadaya terhadap pelaksanaan pembangunan.
2. Sebaiknya terus berupaya mengatasi berbagai hambatan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kelurahan supaya tujuan pembangunan dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan tidak perlu lagi menggunakan tenaga dari luar dalam pelaksanaan pembangunan karena masyarakat mampu melaksanakan berbagai kegiatan.
 3. Sebaiknya upaya yang telah dilaksanakan dan berhasil dengan baik tetap dipertahankan namun memperbaiki permasalahan yang belum diselesaikan yaitu dengan meningkatkan peran serta semua pihak dalam memberikan dukungan kepada pemerintahan kelurahan supaya segala permasalahan dapat diatasi secara bersama-sama.
 4. Sebaiknya ada peneliti lain yang melakukan penelitian lebih lanjut mengingat adanya keterbatasan peneliti dalam melakukan pengumpulan data sehingga dengan ada penelitian selanjutnya terhadap permasalahan yang sama dapat memberikan kontribusi terhadap kesempurnaan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. (2010). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Edisi I. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Bambang Trisantoro Soemantri, (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Fokusmedia, Bandung.
- Beratha, I Nyoman. (1992). *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan*. Ghalia Indonesia.
- Ernady Syaodih. (2015). “*Manajemen Pembangunan*”, Bandung :Refika Aditama.
- Jayadinata, Johara T. (1992) *Tata Guna dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung, ITB.
- Kodoatie, Robert J. (2005) *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar

- Kessa, Wahyudin. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kunarjo, Bambang (2012), *Kebijakan Pembangunan konsep dan aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, UPP STIM. YKPN Yogyakarta.
- Kurniawan, Borni. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Priansa, Donni Juni. (2014). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Sawe, Jamaluddin. (1996). *Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan*. APDN Press.
- Sujarto. (2015). *Beberapa Pengertian Perencanaan Fisik*. Bharatara Karya Aksara, Jakarta.
- Tangkilisan, (2015), *Manajemen Publik*, Gramedia Widia, Jakarta.
- Wirawan. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta: PT Raja.
- Zamroni, (2012). *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: Gavin Kalam Utama

Sumber Undang-undang :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan